

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses dalam melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Proses pembangunan yang mencakup berbagai perubahan mendasarkan status sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, selain mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan program pengentasan kemiskinan. Dimana pada hakekatnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan total masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan dengan tidak mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2011).

Suatu bangsa atau negara yang melaksanakan pembangunan biasanya mempunyai sasaran untuk masa depan yang sebelumnya disepakati bersama, secara demokratis melalui wakil-wakil rakyat atau ditentukan oleh mereka yang berkuasa (pemerintah). Pada sasaran ini dimasukkan hal-hal yang diinginkan dan diharapkan bersama dan bagaimana mencapainya, memperhatikan modal yang tersedia, artinya-modal dalam arti fisik, sumber daya manusia dan alam serta kelembagaan yang ada, yaitu: peluang yang ada maupun berbagai masalah dan kendala yang menjadi tantangan bangsa, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar (Soebagyo, 2015).

Di negara berkembang seperti Indonesia, peranan sumber daya manusia mengambil tempat yang sentral, khususnya dalam setiap pencapaian pembangunan ekonomi, di mana kesejahteraan manusia dijadikan tujuan pokok dalam ekonomi masyarakat. Dalam skala internasional dikenal tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals/MDG's*), yang disepakati oleh kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam KTT 2000. Tujuan MDG's tersebut antara lain, mengentaskan kemiskinan dan kelaparan ekstrem, mewujudkan pendidikan dasar universal, meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat mortalitas anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, menjaga kelestarian lingkungan hidup, membina kerja sama global dan mencapai tujuan pembangunan manusia.

Suatu keberhasilan untuk pencapaian MDGs itu tergantung dari bagaimana pemerintah dapat mengelola dengan baik, seperti kemitraan produktif segenap komponen masyarakat, penerapan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, peningkatan layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di seluruh daerah (Kuncoro, 2013). Serta pemberian anggaran dalam bidang infrastruktur diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat dalam kegiatan sehari-hari sehingga akan terjadi efisiensi dan pada gilirannya akan dapat meningkatkan konsumsi riil perkapita serta dapat mempermudah akses masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Delavallade, 2006).

Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Manusia bukan hanya merupakan obyek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subyek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu wilayah yang secara makro menjadi kemajuan suatu negara (Prasetyo, 2008). Salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Sumberdaya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari angka pendidikan dan kesehatan, serta juga perekonomian suatu wilayah atau negara yang semakin membaik. Oleh karena itu, sebagian besar negara, baik maju maupun berkembang banyak yang menggunakan *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator untuk menilai kualitas sumberdaya manusia.

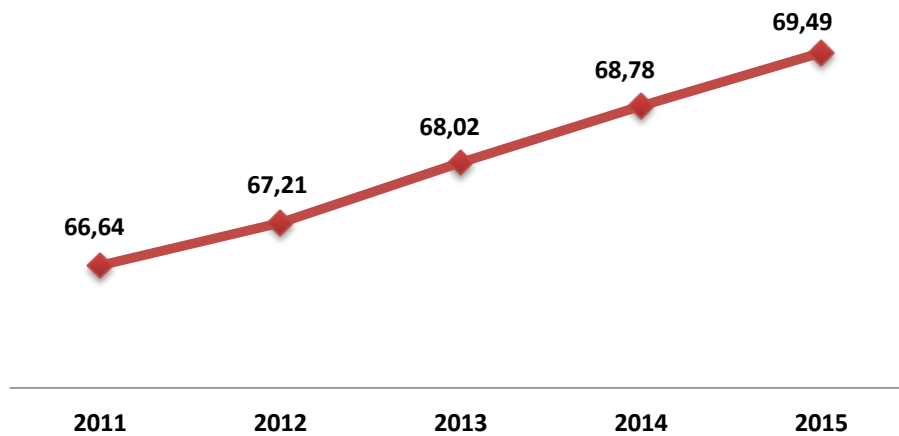
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun tiga dimensi dasar untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia yaitu meliputi umur panjang dan hidup yang sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup yang layak (*desent standart of living*). Dalam mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pendidikan gabungan dari indikator rata-rata lama

sekolah dan angka harapan lama sekolah. Apabila mengukur dimensi hidup yang layak dapat menggunakan indikator kemampuan ekonomi dari daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita dalam pencapaian hidup yang layak (BPS, 2015).

Indeks pembangunan manusia bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antarnegara maupun antardaerah (Kuncoro, 2006). Pembangunan manusia menjadi penting karena apabila suatu daerah tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial maka dapat menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membangun dan memajukan daerahnya. Jadi, sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pembangunan suatu daerah.

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 Kabupaten/Kota dan masing-masing kawasan memiliki akronim kata seperti SUBOSUKOWONOSRATEN (Kawasan Perkotaan Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten), dibentuknya kawasan ini merupakan bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi seperti KEDUNGSEPUR (Kawasan Perkotaan Kendal – Demak – Unggaran – Salatiga – Semarang – Purwodadi), BREGASMALANG (Kawasan Perkotaan Brebes – Tegal – Slawi – Pemalang), dan masih banyak lagi. Bertujuan untuk menjadikan kerja sama antar daerah dalam satu kawasan dan meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan pembangunan. Dijelaskan pada tabel 1-1 Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 sebagai berikut :

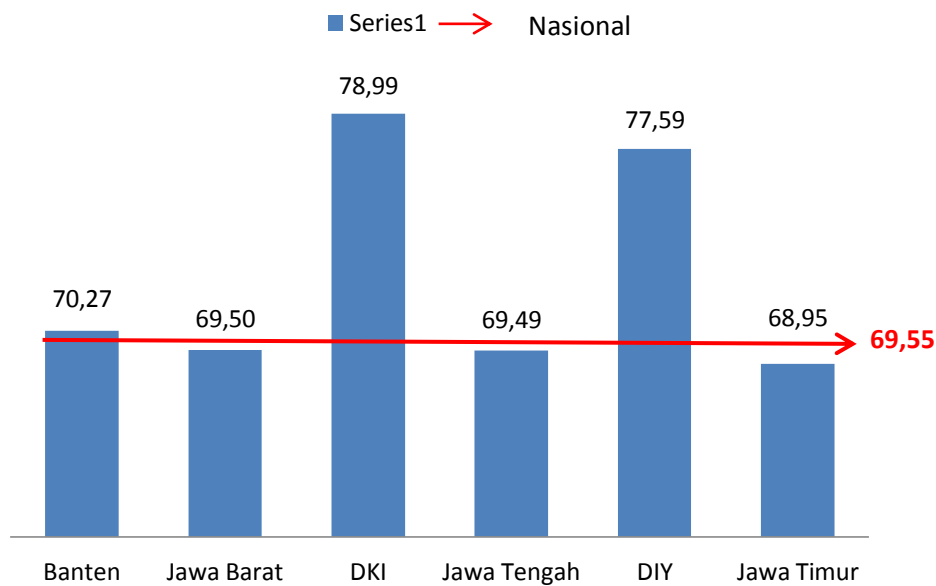
Gambar 1.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015



Sumber: BPS, 2015

Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2011 sebesar 66,64 meningkat menjadi 69,49 pada tahun 2015. Walaupun begitu laju pertumbuhannya dirasa kurang maksimal dilihat dari kecilnya angka peningkatan setiap tahunnya, tahun 2011 ke 2012 (0,57), tahun 2012 ke 2013 (0,81), tahun 2013 ke 2014 (0,76), dan sampai 2015 hanya naik 0,71. Kesimpulan dari grafik tersebut laju pertumbuhan IPM di Provinsi Jawa Tengah berjalan lambat dan perlu lebih dimaksimalkan lagi dengan berbagai instrumen-instrumen yang dimiliki pemerintah daerah maupun pusat serta partisipasi dari masyarakat agar dapat bersaing dengan daerah lain khususnya di Pulau Jawa.

Gambar 1.2
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi se-Jawa dan Nasional Tahun 2015



Sumber: BPS, 2015

Pada Gambar 1.2 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebesar 69,49 nilai ini berada di bawah rata-rata IPM Nasional yaitu 69,55 dan apabila di dibandingkan dengan Provinsi se-Jawa, Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi ke-5 (lima) di bawah Provinsi Banten dan Jawa Barat yang indeks pembangunan manusianya lebih tinggi. Nilai IPM tertinggi di tempati oleh DKI Jakarta dan diikuti DIY. Provinsi Jawa Tengah tergolong bernilai rendah dibandingkan nilai IPM yang diperoleh daerah lainnya di Pulau Jawa.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dapat dicapai melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Jika seseorang memiliki pendapatan yang lebih besar maka orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selain hanya untuk memenuhi kebutuhan primernya

seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan lain seperti kesehatan dan pendidikan. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan per kapita yaitu besarnya pendapatan rata-rata di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Pendapatan perkapita juga mencerminkan tingkat daya beli penduduk di suatu daerah, dengan semakin besarnya pendapatan maka semakin besar pula pengeluarannya (Sasana, 2012).

Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sering dikaitkan dengan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran dalam pembangunan. Bagi negara berkembang Menurut UNDP (dalam Ginting, 2008) menyatakan bahwa hingga pada akhir tahun 1999-an pembangunan manusia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB).

Pertumbuhan ekonomi dibutuhkan dan merupakan sumber utama peningkatan standar hidup (*standard of living*) penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Dengan kata lain, kemampuan dari suatu negara untuk meningkatkan standar hidup penduduknya adalah sangat tergantung dan

ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya (*long run rate of economic growth*) (Nanga, 2005).

Pengeluaran pemerintah diduga juga dapat mempengaruhi perkembangan kualitas dari sumber daya manusia tersebut, khususnya di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan pendapatan, sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan turut serta meningkat (Adelfina dan Made Jember, 2016).

Menurut BAPPENAS (dalam Arsyad, 2010), kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemiskinan menjadi efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Hal tersebut menjadikan gap antara kemiskinan dan pembangunan manusia pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik (Orinbao, 2013).

Seiring dengan capaian IPM Provinsi Jawa Tengah yang masih relatif rendah maka diperlukan perhatian dan perbaikan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta juga kemiskinan yang mempengaruhi kualitas IPM. Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul *“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015.
2. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015.
3. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan/*input* untuk para pengambil keputusan seperti Bupati, Gubernur, BAPPEDA, dan SKPD terkait lainnya dalam memilih kebijakan dan mengalokasikan anggaran yang lebih efektif dalam meningkatkan variabel IPM, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah khususnya.

2. Bagi Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi Perpustakaan Ekonomi Pembangunan.
- b. Khususnya mahasiswa, diharapkan dapat menjadi referensi bagi yang tertarik pada penelitian tentang indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah.

E. Metode Penelitian

Dalam menganalisis pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia penelitian ini menggunakan analisis data panel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak didapat secara langsung yaitu data yang diambil dari penelitian terdahulu maupun perpustakaan yang di publikasikan. Penelitian ini menggunakan gabungan dari data *cross section* 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan data *time series* selama 5 tahun yaitu dari tahun 2011-2015 sehingga dalam penelitian ini ada 175 observasi Data diperoleh dari jurnal, website, perpustakaan, penelitian-penelitian terdahulu dan instansi terkait seperti BPS dan instansi lainnya.

Data panel adalah kombinasi antara data runtut waktu, yang memiliki observasi temporal biasa pada suatu unit analisis dengan data silang tempat yang memiliki observasi-observasi pada suatu unit analisis pada titik waktu tertentu.

Penulis melakukan replikasi model dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 KMS_{it} + \beta_3 BD_{it} + u_{it}$$

Sumber replikasi :

Adelfina dan I Made Jember. 2016. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005-2013”. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Vol.5 No.10: 1011-1025.

Baeti, Nur. 2013. “Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011”. Economics Development Analysis Journal. Universitas Negeri Semarang. Vol.2 No.3.

Keterangan :

IPM_{it} : Indeks Pembangunan Manusia pada unit daerah ke-i dan unit waktu ke-t

PE_{it} : Pertumbuhan Ekonomi pada unit daerah ke-i dan unit waktu ke-t

KMS_{it} : Kemiskinan pada unit daerah ke-i dan unit waktu ke-t

BD_{it} : Belanja Daerah pada unit daerah ke-i dan unit waktu ke-t

i : Menunjukkan Kabupaten/Kota

t : Menunjukkan deret waktu (tahun 2011-2015)

α : Koefisien intersep atau konstanta

u : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan tertulis secara sistematis untuk mempermudah pemahaman, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan landasan teori yang merupakan dasar teoritis penelitian, pengertian tentang Indeks Pembangunan Manusia, pengertian Pertumbuhan Ekonomi, pengertian Kemiskinan, pengertian Belanja Daerah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan

Manusia, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta uraian hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memberikan penjelasan tentang variabel penelitian dan operasional variabel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini beserta penjelasan tentang metode pengumpulan data, serta uraian tentang metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi data Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja Daerah, serta pembahasan dari hasil penelitian yang meliputi variabel yang paling berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan analisis data yang menitik beratkan pada hasil olahan data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan, dalam bab ini juga akan diuraikan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir penulisan yang berisi mengenai simpulan dan serangkaian pembahasan skripsi pada bab IV serta saran – saran yang perlu disampaikan bagi pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan suatu permasalahan yang akan diteliti atau penelitian selanjutnya.